

## Hakim Kasus Irjen Teddy Minahasa Marahi Tim Hotman Paris Hutapea

JAKARTA (IM) - Hakim Ketua Jon Sarman Saragih geram ketika tim kuasa hukum Irjen Teddy Minahasa tak tertib selama sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (20/2).

Jon menegur salah satu anggota tim kuasa hukum yang dipimpin Hotman Paris Hutapea karena dianggap menyampaikan keberatan bukan pada gilirannya.

Teddy Minahasa merupakan terdakwa peredaran narkotika jenis sabu. Peristiwa ini bermula saat jaksa penuntut umum (JPU) bertanya kepada saksi Aiptu Janto Situmorang, berkaitan dengan asal sumber sabu yang diterimanya dari eks Kapolsek Kalibaru Kasranto.

"Tidak ada yang disampaikan ini barangnya dari Sumatera, dari Bukittinggi?" tanya jaksa kepada Janto dalam persidangan.

Belum sempat Janto menyelesaikan jawabannya, salah seorang anggota kuasa hukum Teddy Minahasa langsung mengajukan keberatan kepada majelis hakim.

"Keberatan, Yang Mulia. Keberatan, Yang Mulia," kata tim kuasa hukum Teddy. Menanggapi keberatan

kubu Teddy, Hakim Jon Saragih lantas meminta agar mereka bersabar menunggu giliran setelah jaksa penuntut umum.

Jon mengingatkan soal aturan mengeluarkan pihak yang tidak tertib di ruang sidang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

"Kalau enggak (tertib), saya terapkan Pasal KUHP. Kita ini yang tidak tertib saya suruh ke luar, saya ingatkan. Saya ingatkan sekali lagi pengadilan ini adalah pengadilan yang luhur. Paham kan?" ucap Jon.

Seketika seisi ruangan sidang terdiam saat Jon sedikit menaikkan suaranya. Hakim Jon lalu kembali mengesakan, pihak kuasa hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan, tetapi sesuai dengan gilirannya.

Hakim Jon membacakan isi Pasal 218 ayat 1 KUHP yang menyatakan dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat ke pengadilan. Sehingga, dia menyebut tak segan mengeluarkan siapa saja yang mengganggu jalannya persidangan. ● mei

## KPU: Pemilu 2024 Masih Sistem Proporsional Terbuka

JAKARTA (IM) - Sistem proporsional terbuka dan tertutup pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif di 2024 masih menjadi perdebatan. Saat ini, sistem proporsional tengah disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik sistem proporsional untuk Pemilu memang menjadi polemik saat ini. Namun dia menegaskan bahwa KPU masih melaksanakan ketentuan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Sistem pemilu untuk Pemilu legislatif adalah Sistem Proporsional Terbuka, karena norma yang terdapat ketentuan pasal 168 ayat 2 UU nomor 7/2017 ini masih efektif berlaku," jelasnya di diskusi bertema Setahun Jelang Pemilu terpanjang di Channel YouTube Survei Kedai Kopi,

Senin, (20/2).

Sehingga, kata dia KPU RI tengah merancang peraturan dan sistem informasi untuk sistem proporsional terbuka pada Pemilu legislatif di 2024.

"Kami menyelenggarakan pemilu sesuai dengan aturan berlaku, salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepentingan hukum," ujar Idham.

Sementara masih menjadi perdebatan dan disidangkan di MK, KPU sampai saat ini kata Idham tetap melanjutkan proses Pemilu sesuai aturan. Menurut Idham perdebatan itu tidak menjadi masalah.

"Saya ingat yang dikatakan oleh Jürgen Habermas (filosuf dan sosiolog dari Jerman). Demokrasi yang baik itu ditandai dengan demokrasi yang memiliki pencapaian yang rasional," ucapnya. ● han

## Jhon LBF Angkat Bicara atas Tuduhan Lakukan Penipuan

JAKARTA (IM) - Jhon LBF, pengusaha viral asal Semarang, Jawa Tengah digugat Rp1,8 miliar oleh salah satu perusahaan. Jhon LBF dituduh melakukan penipuan melalui perusahaannya, PT Lima Sekawan (Hive Five).

Kuasa hukum pengugat PT Adidharma Ekapurna, Arif Edison sebelumnya mengungkapkan menjelaskan kasus itu terjadi pada 2022 lalu. Saat itu, kliennya menyerahkan uang sebesar Rp800 juta sebagai Jhon LBF alias Henry Kurnia Adhi Sutikno, yang mengaku bisa menangani kasus hukum kliennya.

Setelah uang diserahkan terungkap bahwa sesungguhnya Jhon LBF tak memiliki kompetensi hukum. Terkait tuduhan ini, Jhon LBF pun angkat bicara. Ia

mengatakan sangat menyelesaikan atas tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya.

"Saya sangat sesalkan ya orang tersebut direktur dari PT Adidharma itu, itu saya tolong dan tidak ada saya menyampaikan seperti salah satu pengacara berinisial RA yang menyampaikan katanya saya ini menerima kuasa dan lain-lain," ujar Jhon LBF di akunnya @jhon.lbf\_official, dikutip, Senin (20/2).

"Seorang pengacara belum menelaah ya kebenaran sebuah berita tapi sudah mulai ikut-ikutan pansos. Saya kenal abang pak pengacara inisial RA dulu tapi bang jaman dulu terus sekarang abang tiba-tiba muncul nampilin muka saya di situ abang menggiring opini seolah-olah saya menerima kuasa," ujarnya.

Pengusaha muda yang juga seleb Tik Tok ini menggandeng firma hukum milik pengacara Sunan Kalijaga sehingga bukan dia yang mengurus perkara tersebut.

"Saya bukan pengacara bang mana berani saya terima kuasa. Itu perusahaan saya bekerja sama dengan Sunan Kalijaga Law Firm, pengacaranya ya bang Sunan yang ngurusin," katanya. ● han

### PENGUMUMAN

Telah hilang SHGB No.685/ Jembatan Besi, luas 88 m2 dan SHGB No.713/ Jembatan Besi, luas 57 M2, keduanya atas nama PT Cakrawira Bumimandala

### PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa PT AJI SUMBER REJEKI berkedudukan di Kota Banjarmasin ("Perseroan") telah dibubarkan, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirikular Nomor 016, tanggal 20 Februari 2023, dibuat dihadapan ROSDIANA, SH., Notaris di Kota Bekasi dan diangkat Sdr. Iwan KUSWANTO H. WIBOWO, sebagai Likuidator yang beralamat di Jalan Kebon Nanas Selatan 1 nomor 30 D, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatiregara, Jakarta Timur.

Kepada Para kreditor Perseroan dimohon untuk mengajukan tagihan disertai bukti yang sah dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Likuidator.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Banjarmasin, 21 Februari 2023  
PT AJI SUMBER REJEKI  
Likuidator

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## KPK TANGKAP RICKY HAM PAGAWAK

Tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam proyek pengadaan barang/jasa di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua, Ricky Ham Pagawak (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/2). KPK berhasil menangkap Bupati Mamberamo Tengah nonaktif itu setelah sempat menjadi buronan dan masuk daftar pencarian orang (DPO) selama tujuh bulan.

# Pembentukan Kodam di Tiap Provinsi Bakal Membebani Keuangan Negara

Kalau Korem dinaikin jadi Kodam, kemungkinan besar akan ada Korem baru. Tentu pengeluaran negara pun akan semakin besar.

JAKARTA (IM) - Peneliti dan Studi Strategis Indonesia Lembaga Studi Pertahanan Beni Sukadis menilai, pem-

bentukan Komando Daerah Militer (Kodam) TNI Angkatan Darat (AD) di tiap provinsi akan membebani keuangan negara.

Sebab, pembentukan Kodam baru akan berdampak pada pengadaan sarana prasarana baru dan peningkatan kebutuhan personel.

"Tentu ada konsekuensi anggaran, dari sisi anggaran sarana prasarana, kemudian personel. Sehingga, ini tentu jelas membebani selain memang tidak sesuai dengan strategi pertahanan," ujarnya.

Selain itu, kata Beni, pembentukan Kodam baru akan menimbulkan efek pembentukan Komando Resor Militer (Korem) yang baru. Pasalnya, ada kemungkinan setiap Korem yang ada di provinsi yang belum memiliki Kodam akan berubah menjadi Kodam.

"Kalau Korem dinaikin jadi Kodam, akan dibikin Korem baru. Kembali ke pertanyaan awal lagi pengeluaran negara semakin besar. Ini tidak bisa ditolerir lah," kata Beni.

Menurutnya, pembentukan Kodam di tiap provinsi bukanlah program yang dijanjikan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

"Seingat saya ketika Pak Prabowo naik 2019 itu kita tahunya ada tiga program Pak Prabowo, pengadaan, pengadaan, dan pengadaan. Enggak ada ngomong soal pengembangan Kodam,"

ujar Beni.

"Jadi memang fokusnya Prabowo apakah dari modernisasi alutsista baru atau dengan yang bekas," katanya.

Sebagai informasi, TNI AD berencana melengkapi Kodam di setiap provinsi. Prabowo Subianto mengatakan, rencana penambahan Kodam hingga kini terus dimatangkan.

"Kita godok terus. Insha Allah kita mulai sedikit-sedikit," ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada 11 Februari 2023.

Prabowo menjelaskan, penambahan Kodam ini berkaitan dengan sistem pertahanan Indonesia yang menitikberatkan pertahanan bersama dan rakyat semesta. Dengan begitu, sistem pertahanan tersebut harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah dan sipil.

"Jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, selalu dengan pemerintah sipil. Selalu berdamai. Sama polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada Polda," kata Prabowo. ● mei

## Brigjen TNI JO Sembiring Pimpin Operasi Pembebasan Pilot Susi Air di Rimba Papua

JAYAPURA (IM) - Jenderal Kopassus Brigjen TNI JO Sembiring, memimpin langsung operasi pembebasan pilot Susi Air,

Kapten Philip Mark Mahtens di rimba Papua.

Seperti diketahui bahwa pilot asal Selandia Baru tersebut disandera Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) teroris di Papua pimpinan Egianus Kogoya.

Sembiring, selaku Komandan Korem 172/Praja Wira Yakti (PWY) ini memastikan, saat ini keamanan di Distrik Suru-suru, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, berlangsung kondusif.

"Memang benar kondisi di Suru-suru semakin kondusif sehingga masyarakat mulai kembali ke kampung dan mendiami rumahnya,"

kata JO Sembiring, Senin (20/2).

Sebelumnya tanggal 28 Januari 2023 warga yang dipimpin kepala Distrik Suru-suru kembali ke kampung halamannya untuk meyakinkan situasi telah aman atau tidak, paparnya. Bahkan, pada Sabtu (18/2) sekelompok masyarakat dengan membawa Bendera Merah Putih tiba di Kampung Suru-suru dalam keadaan aman yang disambut Danpos Satgas Yonif R 600/Modang.

Jenderal Kopassus ini mengatakan, kembalinya warga Suru-suru itu setelah warga yang tiba terlebih dahulu memberitahukan kepada sanak keluarganya bahwa kondisi telah aman sehingga berani mereka kembali ke kampung halamannya.

"TNI bersama Pemkab Nduga berupaya meyakinkan masyarakat agar mau kembali karena kampungnya sudah aman dari gangguan KKB," kata JO Sembiring.

Dia mengatakan Satgas Yonif R 600/Modang telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan distrik tersebut aman sehingga masyarakat dapat kembali ke kampung halamannya.

Kabupaten Nduga merupakan bagian dari Kodim 1715/Yahukimo dan Korem 172/PWY, namun satgas yang bertugas berada di bawah kendali Komando Korem 174/ATW. Masyarakat Suru-suru sempat mengungsi akibat terjadinya gangguan keamanan yang dilakukan KKB bulan Desember 2021. ● han

## Empat WN Kenya Diamankan Imigrasi, Kerap Berulah dan Meresahkan Warga

TANGERANG (IM) - Empat warga negara (WN) Kenya diamankan petugas Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang. Keempatnya melanggar keimigrasian dan kerap berulah membuat keributan yang mengganggu ketertiban umum.

"Pengamanan keempat WNA ini kami lakukan dalam operasi menindaklanjuti laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan dan kegiatan yang dilakukan WNA tersebut," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Tejo Harwanto, saat konferensi pers di Kantor Imigrasi Tangerang, Senin (20/2).

Keempat WN Kenya tersebut berinisial BTM, DMM, PPM, dan DNI. Mereka datang bersama ke Indonesia pada 21 November 2022. Selain dilaporkan mengganggu ketertiban, keempat WN Kenya ini juga dilaporkan karena tidak membayar uang sewa di salah satu tempat penginapan di daerah Karawaci, Kota Tangerang.

Sebagai informasi, dua orang dari keempat WN Ke-

nya itu, DPM dan PPM sudah pernah dideportasi pada 2029 lalu karena masuk secara ke Indonesia ilegal dan membuat kegaduhan.

Sebenarnya, DPM dan PPM tidak hanya dideportasi, tapi juga dicekal masuk ke Indonesia. Namun keduanya berhasil masuk kembali pada 21 November 2022 dengan menggunakan paspor palsu dan mengubah identitas mereka pada paspor. "Kenapa bisa masuk Indonesia lagi, karena mereka melakukan pemalsuan dokumen. Tahun kelahiran mereka pada paspor yang baru, berbeda dengan data mereka saat dideportasi di tahun 2020 lalu," ucapnya.

Atas pengamanan itu, dua orang dari empat WNA diduga melanggar pasal 123 huruf (a) dan (b) dan/atau pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf (a) dan (f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan dua WNA lainnya diduga melanggar pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf (a) dan (f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Sebagai tindak lanjut keempat WNA tersebut akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa Deportasi disertai Penangkalan. ● mei

### PENGUMUMAN

Berdasarkan NOTULEN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SUMBER DEWISA ALAM, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah diambil keputusan untuk menurunkan Modal Dasar dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) menjadi modal dasar berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan modal setor dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) menjadi modal setor berjumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), menunjuk kepada Pasal 44 (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka bagi para yang berkepentingan/para Kreditor dan mempunyai keberatan atas hal tersebut, harap mengajukan keberatan secara tertulis dengan bukti pendukung yang sah paling lambat 60 hari terhitung dari tanggal pengumuman ini ke alamat:

JL. RS. FATMAWATI NO.36  
JAKARTA SELATAN  
Jakarta, 21 Februari 2023  
Direksi  
PT SUMBER DEWISA ALAM

PT. SOKA HILL RESORT JI. RAYA CIDADAS NO. 16 RT.04, RW.04, KELURAHAN CIDADAS KECAMATAN GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT, 16964, INDONESIA					
<b>PENGUMUMAN PENGURANGAN MODAL PT. SOKA HILL RESORT</b>					
<p>Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 44 tentang Pengurangan Modal Perseroan. PT. Soka Hill Resort, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia ber-NPWP 31.206.288-8-043.000, berkedudukan di Jl. Raya Cidasas No. 16 RT. 004/04, Cidasas, Gunung Putri, Bogor-Indonesia, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham dalam Notulen Rapat Pemegang Saham tertanggal 15 Februari 2023 telah disetujui:</p>					
<p>1. Penurunan Modal Dasar Perseroan semula Rp. 18.360.000.000,- (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) menjadi Rp. 10.098.000.000,- (Sepuluh Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).</p>					
<p>2. Penurunan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan semula 18.903 (Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga) Lembar saham atau sebesar Rp. 17.352.954.000,- (Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) menjadi 2.750 (Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) Lembar saham atau sebesar Rp. 2.524.500.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).</p>					
No	Jenis Modal	Nominal Modal - Rp		Lembar Saham	
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
1	Modal Dasar	18.360.000.000	10.098.000.000	20.000	11.000
2	Modal Ditempatkan dan Disetor	17.352.954.000	2.524.500.000	18.903	2.750

Jika ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tambahan atas rencana Pengurangan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dapat menghubungi kami pada alamat yang tertera diatas yang dialamatkan pada bagian keuangan.

Bogor, 21 Februari 2023

Sandeep Tekriwal  
Direktur

### PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa terdapat rencana perubahan pemegang saham pengendali dalam PT TIDAR MEDIA CITRA PERKASA, berkedudukan di Kota Magelang, Jawa Tengah ("Perseroan"). Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").

Magelang, 21 Februari 2023  
PT TIDAR MEDIA CITRA PERKASA  
Direksi  
Surat Menyurat dialamatkan ke:  
Jalan Jendral Sudirman No. 169,  
Kelurahan Tidar Selatan,  
Kecamatan Magelang Selatan,  
Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah  
56123